



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan [Pasal 10 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rowindo Hatorangan Tambunan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 April 2021, Pukul 11.26 – 11.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rowindo Hatorangan Tambunan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir ini, memperkenalkan diri? Halo, halo? Itu di-unmute, ya. Miknya dibuka, suaranya jangan masih kekunci. Suaranya masih kekunci.

2. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Oke, Pak.

3. KETUA: SALDI ISRA

Nah.

4. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

5. KETUA: SALDI ISRA

Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir ini?

6. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya Rowindo Hatorangan, Pak Hakim.

7. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Bapak apa ... mengajukan Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ya?

8. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap, Pak.

9. KETUA: SALDI ISRA

Permohonan Bapak sudah diregistrasi Nomor 14 Tahun 2021. Nah, sekarang Sidang Pendahuluan, agenda kita adalah mendengar keterangan pokok-pokok Permohonan yang Bapak sampaikan. Nah setelah itu, Hakim Panel akan memberi nasihat, catatan, dan segala macam (...)

10. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terkait dengan Permohonan Bapak, ya?

12. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak.

13. KETUA: SALDI ISRA

Bapak sendiri ini, enggak ada kuasa hukumnya?

14. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Enggak, Pak. Saya sendirian, Pak.

15. KETUA: SALDI ISRA

Bapak sendirian, ya?

16. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

17. KETUA: SALDI ISRA

Itu, tuh kok wajahnya turun-naik, turun-naik gitu?

18. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Koneksi saya agak lambat, Pak, buruk. Kalau boleh apa saya ... gambar saya, saya matikan gambar, biar koneksi suaranya lebih lancar?

19. KETUA: SALDI ISRA

Di mana ini posisi Bapak sekarang ini? Pak Rowindo posisinya di mana? Halo? Pak Rowindo?

Nah, ini memang koneksinya bermasalah, ya.
Bagaimana ini teknisi, apa yang bisa dilakukan?

20. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Koneksinya jelek.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, koneksinya jelek.

22. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya matikan video saya biar koneksinya lebih baik, boleh Pak?

23. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, silakan.

24. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, baik.
Oke, Bapak Hakim yang terhormat bisa dengar saya?

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kita bisa mendengar, Pak Rowindo. Silakan, apa yang mau disampaikan? Sampaikan pokok-pokok permohonan, ya?

26. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Langsung aja, ya Pak, ke pokok permohonan, ya Pak?

27. KETUA: SALDI ISRA

Silakan. Jadi yang dijelaskan itu ada 4 poin.

28. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

29. KETUA: SALDI ISRA

Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, alasan mengajukan Permohonan, kemudian menyampaikan Petitem. Silakan.

30. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya mulai dari Legal Standing atau langsung pokok-pokok Permohonan, Pak?

31. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya?

32. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak. Baik.

33. KETUA: SALDI ISRA

Legal Standing. Nah, ini Anda jelaskanlah sedikit ini kenapa Anda memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini? Jelaskan.

34. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap, kedudukan hukumnya sebagai warga negara, Pak.

35. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Lalu kerugiannya bagaimana? Kerugian konstitusionalnya apa?

36. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Kerugiannya, saya merasa hak-hak saya yang dijaminan oleh konstitusi merasa telah dibatasi dan di ... di ... di ... dibatasi, Pak.

37. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Anda merasa bahwa keberlakuan Pasal 10 membatasi hak konstitusi ... hak konstitusional Saudara, ya?

38. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul, Bapak.

39. KETUA: SALDI ISRA

Itu hak konstitusionalnya di mana diatur, pasal ... di mana saja, hak-hak konstitusional apa saja itu?

40. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Yang saya sertakan di sini ada ... ada 4, Pak.

41. KETUA: SALDI ISRA

Apa itu?

42. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1).

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

44. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

46. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Lalu Pasal 28E ayat (3)-nya, Pak.

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

48. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

"Setiap orang kebebasan berserikat (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke, yang penting begini, ya. Ada Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ya?

50. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

51. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang jadi dasar?

52. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

53. KETUA: SALDI ISRA

Cantolan kerugian hak konstitusional itu?

54. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul, Pak.

55. KETUA: SALDI ISRA

Nah, coba dijelaskan itu, hubungan kausalitas di mana itu?

56. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, saya coba. Jadi dengan pemberlakuan PSBB, Pak. Diberlakukanlah beberapa peraturan oleh pemerintahan daerah yang kemudian membatasi hak-hak tersebut, Pak. Seperti tadi seperti hak untuk beribadah, untuk berkumpul.

57. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Anda merasa dibatasi itu karena banyaknya peraturan di daerah-daerah yang membatasi ruang gerak Anda begitu?

58. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul, Pak?

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi yang mau dijelaskan terkait dengan Legal Standing?

60. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Itu, itu dulu, Pak.

61. KETUA: SALDI ISRA

Itu saja, oke, sekarang alasan mengajukan Permohonan.

62. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, ini saya baca atau bagaimana ini, Pak. Atau (...)

63. KETUA: SALDI ISRA

Intinya saja, nanti kalau Anda baca belajar membaca kita jadinya nanti.

64. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, baik, Pak, baik. Oke, di dalam alasan Permohonan saya, saya menulis latar belakangnya, Pak, Permohonan saya.

65. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

66. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Jadi, saya tulis di dalam Permohonan saya, saya sudah mengikuti, Pak, apa yang terjadi dengan pandemi ini sejak November 2019 sebenarnya, Pak. Namun informasi yang saya terima itu kebanyakan dari luar, Pak.

67. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

68. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Artinya mendapatkan informasinya itu mentahlah katakan. Intinya saya ikuti tidak terlalu intens pada saat awal-awal sampai suatu apa yang terjadi sama adik saya, Pak. Ketika adik saya kesulitan mencari rumah sakit persalinan dan saya mulai merasa ada yang salah. Lalu di situlah dimulai bulan Maret, saya mulai mencari (...)

69. KETUA: SALDI ISRA

Halo? Halo? Ini sudah dihilangkan foto apanya ... wajahnya, suaranya hilang lagi sekarang. Pak Rowindo?

70. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Maaf, Pak, terputus lagi.

71. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Pak Rowindo di mana sekarang ini? Posisinya di mana?

72. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Di rumah, Pak.

73. KETUA: SALDI ISRA

Di rumahnya di mana?

74. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Di Kampung Baru, Pak, di Rawasari, Pak.

75. KETUA: SALDI ISRA

Rawasari, Kampung Baru itu di mana itu?

76. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Di Jakarta Timur, Pak.

77. KETUA: SALDI ISRA

Oh, di Jakarta Timur?

78. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

79. KETUA: SALDI ISRA

Oh, di Jakarta Timur bisa begitu juga sinyalnya?

80. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak. Mungkin karena koneksi saya yang (...)

81. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ya, ya, mungkin. Silakan dilanjutkan!

82. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, terlepas dari ... saya bukan berlatar belakang hukum, Pak, tapi karena didorong oleh keinginan, keinginan untuk mencari tahu sedang terjadi apa, gitu. Jadi saya menyusun ini di bulan ... di bulan (...)

83. KETUA: SALDI ISRA

Maret?

84. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya baca saja ya, Pak, saya sudah mempersiapkan kemarin.

85. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan dibaca, Pak, silakan!

86. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, ya. Awalnya saya juga takut ketika pandemi ini berawal saya seperti semua orang, takut dan khawatir karena saya tidak tahu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Takut akan unknown sesuatu yang tidak tahu, mengerti atau tidak dimengerti itu wajar. Berhati-hati adalah cara atau bagian untuk bertahan hidup.

Poinnya adalah saya mengerti mengapa semua orang takut, khawatir, dan panik ketika pandemi ini terjadi. Namun saya ingin lebih mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi untuk dapat lebih mengerti sehingga dapat mengambil tindakan berdasarkan kesadaran.

Saya mulai tersadar ketika adik saya kesulitan mencari rumah sakit untuk bersalin anak keduanya. Dengan apa yang terjadi dengan ibu saya ketika saya takut untuk membawa ibu saya ke rumah sakit karena tersengat lebah, takut untuk kalau ibu saya dites nanti ternyata positif, takut dilakukan isolasi dimana saya tidak bisa melihat beliau secara langsung dan menjaga beliau secara langsung. Sehingga pada saat itu saya khawatir untuk bawa mama saya ke rumah sakit ketika dia tersengat lebah dan itu membuat saya berpikir ada yang salah.

Lalu dengan apa yang terjadi dengan para ponakan saya yang tidak bisa bersekolah, sama dengan adik atau kakak saya yang kesulitan di dalam mencari nafkahnya oleh karena batasan atau peraturan-peraturan yang mengikat berkenaan dengan penanganan. Dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekitar juga saya lihat dengan kehidupan sosial seperti normal seperti beribadah, pernikahan, pemakaman, dan lain-lainnya membuat saya ingin mengerti dan lebih sadar.

Saya telah melihat hal ini sejak Maret 2020 (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke, Pak, jadi di sini Pak Rowindo? Halo Pak Rowindo?

88. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, ya.

89. KETUA: SALDI ISRA

Bapak langsung saja ... apa namanya ... kira-kira Bapak jelaskan mengapa pasal yang Bapak mohonkan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang perlu Bapak jelaskan sekarang.

90. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

91. KETUA: SALDI ISRA

Kalau latar belakangnya itu nanti biar kami baca nanti.

92. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak, baik.

93. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

94. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Oke. Jadi pada intinya alasan pokok Permohonan saya seperti ini, Bapak Hakim yang saya hormati. Saya melihat Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi, "Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat adalah sebuah aturan yang dapat membuka pintu pada penerapan peraturan yang dapat menanggukkan, membatasi hak dan kebebasan Pemohon, rakyat, yang dijamin dalam konstitusi." Hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tersebut, ditetapkan berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan oleh kekuasaan pemerintahan. Oleh karenanya, keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan menanggukkan, sementara hak-hak dan kebebasan rakyat yang dijamin di dalam konstitusi haruslah diambil berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan oleh kekuasaan pemerintahan.

95. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

96. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Apabila keputusan tersebut diambil berdasarkan kekuasaan pemerintahan, maka hal ini menyebabkan pelanggaran konstitusi karena telah menempatkan kedudukan kekuasaan pemerintahan di atas kedaulatan rakyat. Hal tersebut adalah sebuah pelanggaran konstitusi karena di dalamnya ... di dalam ketetapanannya, konstitusi menempatkan kedaulatan rakyat berada di atas kekuasaan pemerintah. Kedaulatan rakyat yang berada di Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berada di atas kekuasaan pemerintah." Yang berada di Pasal 4 ayat (1), "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Hierarki dari kedua pasal ini adalah cerminan dari maksud yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea keempat, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan,

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Kekuasaan pemerintah lahir dari kedaulatan rakyat. Peraturan yang menempatkan kedaulatan rakyat di bawah kekuasaan pemerintahan adalah sebuah pelanggaran konstitusi.

97. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

98. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Sesungguhnya, itulah Permohonan pokok ... Alasan Permohonan (...)

99. KETUA: SALDI ISRA

Itu intinya, ya?

100. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Pak Hakim.

101. KETUA: SALDI ISRA

Silakan Petitemnya! Apa yang diminta ini? Sampaikan Petitemnya!

102. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya. Petitemnya adalah berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menyatakan Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Untuk memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Itu, Pak.

103. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Pak Rowindo ini sarjana hukum, ya? Bukan, ya?

104. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Bukan, Pak.

105. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini belajar bikin Permohonan dari siapa, Pak?

106. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Belajar sendiri, Pak.

107. KETUA: SALDI ISRA

Oh, belajar sendiri, ya? Oke.
Pak Rowindo, Bapak sudah menyampaikan, ya (...)

108. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

109. KETUA: SALDI ISRA

Menyampaikan pokok-pokok Permohonan, mulai dari ... apa ...
Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, alasan mengajukan
Permohonan, terakhir sudah menyampaikan Petitum.

110. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

111. KETUA: SALDI ISRA

Nah, walaupun ada yang tidak disampaikan, itu dianggap
dibacakan.

112. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak.

113. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang Pak Rowindo mendengarkan baik-baik, Majelis Panel akan memberikan nasihat (...)

114. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak.

115. KETUA: SALDI ISRA

Terkait dengan Permohonan Bapak ini, ya.

116. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak.

117. KETUA: SALDI ISRA

Bapak ada pena, enggak, bisa mencatat di situ?

118. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ada, Pak. Saya langsung depan komputer, Pak.

119. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ya. Nah, ini pertama, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Bapak mendengarkan, ya!
Silakan, Yang Mulia!

120. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak.

121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selamat siang, Pak Rowindo Tambunan.

122. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Selamat, Bapak Hakim.

123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Di sini saya mau nanya dulu identitas, ini masih kurang lengkap. Pekerjaannya apa, Pak ... Pak Rowindo?

124. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya ... saya tidak bekerja di kantor, Pak (...)

125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

126. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Saya bekerja serabutan, Pak.

127. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Serabutan? Oh.

128. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Apa saja yang bisa saya cari ... untuk mencari nafkah, Pak.

129. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Serabutan swastalah, gitu, ya?

130. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Pak, ya.

131. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, terasa betul, ya, dalam kehidupan sehari-hari adanya PSBB itu, ya?

132. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul, Pak.

133. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cuma di daerah tidak seragam, begitu, ya? Bermacam-macam?

134. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul.

135. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, jadi menyiksa? Kira-kira ... apa namanya ... mengkhawatirkan, begitu, ya?

136. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada ... tidak ada keadaan yang menyakinkan, begitu?

138. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul, Pak.

139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Baik. Permohonannya sudah tertata dengan baik ini. Berarti, Bapak selaku autodidak tadi bilanganya, belajar sendiri, berarti sudah cepat memahami, ya?

140. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, perlu juga pedoman-pedoman dalam membuat Permohonan ini, ya.

142. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, siap.

143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada PMK kita, yaitu PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu yang harus dipedomani, ya.

144. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap, Pak.

145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, juga membuat undang ... menuliskan undang-undang di Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya.

146. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, bisa ditambahkan nanti itu. Kemudian, juga undang-undang yang terakhir Bapak sebut di sini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu (...)

148. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ditambahkan sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya. Nah, itu ... itu supaya lengkap, ya.

150. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Oke.

151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, tadi dibatasi hak-hak konstitusional Saudara, ya, di dalam legal standing tadi sudah di ... dinyatakan di ... di dalam halaman 3 ini, ya, inilah yang harus nanti diperbaiki oleh Saudara, bagaimana kerugian konstitusional itu, ya ... ya.

152. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap, Pak.

153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana nanti itu tadi sudah disarankan agar dielaborasi lebih (...)

154. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lebih jauh, ya.

156. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap, Pak.

157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, kemudian dasar pengujiannya ini, Pasal 40 ... saya ulangi, Pasal 28 ... Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan seterusnya itu, itu (...)

158. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu pasal dan ayatnya di depan, ya. Nah, undang-undangnya di belakang. Jadi, jangan (...)

160. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Oh, ya.

161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jangan lebih dahulu Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya disebut, ya.

162. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Pak, baik.

163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, nanti itu harus Saudara uraikan seluruhnya ini. Nah, kenapa berdasarkan Pasal 28E ini ada pertentangannya dengan norma itu ... norma yang diuji kan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan itu kan. Nah, jadi harus diuraikan itu. Pasal 28E itu dasar pengujiannya, kenapa bertentangan dengan itu, nah silakan nanti diuraikan itu lebih lanjut, ya.

164. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, dalam alasan-alasan permohonan memang ini terlalu panjang, ada latar belakang lagi. Tapi intinya tadi itu yang Saudara jelaskan, ya.

166. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Adanya ketidakpastian mengenai soal keadaan. Tetapi saya belum melihat ada hubungannya dengan norma yang Saudara uji ini, norma yang diuji kan Pasal 1 ... Pasal 10 ayat (1) itu menye ... menyebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.

168. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Siap.

169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini jadi kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Nah, menurut Saudara kan harusnya itu diambil dari kedaulatan ... diambil dari kesepakatan, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat.

170. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan atas kekuasaan pemerintah, begitu ya.

172. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul.

173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Padahal (...)

174. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Padahal antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintah itu kan sudah ada dibentuk undang-undang, gitu ya.

176. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Betul.

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, gimana menurut Saudara? Undang-undang itulah yang menjadi pedoman. Walaupun (...)

178. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Seperti ... maaf, boleh ... boleh saya (...)

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti ... nanti saja, ya. Nanti saja.

180. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Oh, ya. Siap, baik.

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu yang perlu Saudara pahami nanti. Nah, dan undang-undang inilah yang menjadi pedoman ... pedoman dari pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya.

Nah, itu kira-kira (...)

182. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya perlu jelaskan supaya nanti disesuaikan dari alasan-alasan permohonan Saudara ini. Karena secara praktis kalau nanti diambil lagi ... apa namanya ... pendapat rakyat melalui asas kedaulatan itu tadi, bagaimana mau me ... menerapkan lagi di da ... dikeadaan yang sedang ... apa namanya ... berlangsung ini? Karena keadaanya cepat, ya.

184. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu perlu nanti Anda per ... pertimbangkan supaya nanti ini ... permohonan ini ada ... ada hubungannya ... saya ulangi, posita-posita itu ada hubungannya dengan norma yang ada ... yang Anda uji ini.

186. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, karena di sini normanya sudah menjelaskan bahwa pemerintahlah yang menentukan atau menetapkan ada kedaruratan tentang Kesehatan masyarakat atau tidak, gitu ya.

188. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kemudian nanti di petitum ini sudah Saudara minta agar norma ini dihilangkan, kan gitu ya? Betul, ya? Nanti kalau ... kalau ini dihilangkan bagaimana pengaturannya kalau ada tentang perlu mau ditetapkan oleh Pemerintah tentang keadaan (...)

190. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang dihadapi. Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya supaya Anda nanti juga berpikir apakah di norma ini permasalahan yang terjadi atau tidak.

192. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah di norma yang lain. Itu yang mau ... mungkin saya mau pertanyakan, ya.

194. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau menurut Saudara norma ini yang bermasalah, ya?

196. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Barang kali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

198. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kembali kepada Ketua Panel.

200. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Berikutnya Pak Rowindo, ini nasihat berikutnya dari Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Silakan.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Rowindo, ya? Pak Rowindo?

202. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selamat siang, Bapak.

204. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Selamat siang.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kami sudah bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Bapak dalam Permohonannya.

206. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang penting di Posita itu, posita itu alasan-alasan Permohonan itu, Pak. Itu Bapak buat sederhana saja, jangan terlalu ... apa ... terlalu banyak yang sebenarnya kan intinya, Bapak, itu tidak setuju dengan normanya itu dengan Pasal 10 itu ataukah penetapan statusnya apa, Pak Rowindo?

208. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau, Bapak di sini kan saya perhatikan ketika Pemerintah menetapkan status PSBB itu tidak melibatkan rakyat. Nah, persoalannya ada di Pasal 10 ayat (1) ini atukah di dalam pelaksanaan penetapan statusnya itu, Pak, yang Bapak persalkan sesungguhnya?

210. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, nanti ... enggak usah dijawab. Kalau yang Bapak persalkan adalah masalah penetapan statusnya itu, Pak Rowindo harus bisa membedakan bahwa itu bukan persoalan undang-undangnya, Pasal 10-nya, tapi ada pada persoalan penerapannya, pelaksanaannya, pelaksanaannya itu bisa personelnya, bisa juga ketika kemudian mengimplementasikan memaknai atau penyelenggara itu memaknai norma itu, tapi normanya sebenarnya norma yang aman-aman saja seperti yang disampaikan Yang Mulia Bapak Manahan tadi, kalau ini nanti dihilangkan nanti pemerintah tidak bisa dong kemudian menetapkan adanya kedaruratan itu kalau nanti ada hal-hal (...)

212. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Kan ada ya, Pak, penggantinya, Pak?

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada.

214. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Enggak, maksudnya memang harus ada yang menetapkan ketika keadaan darurat.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Pak, Bapak silakan kalau Bapak itu tetap kekeh bahwa yang menjadi masalah itu adalah Pasal 10 ayat (1) silakan itu

pilihan Bapak, hak Bapak. Tapi cukup itu dijelaskan secara sederhana saja di permohonan di alasan-alasan permohonan itu Pak. Bapak di alasan-alasan permohonan itu terlalu terlalu ... apa ... terlalu panjang dan kemudian banyak redundant, banyak pengulangan-pengulangan yang sebenarnya esensinya ya itu itu saja yang intinya karena tidak dilibatkannya rakyat kemudian Bapak mencontohkan seperti Ibu, ponakan yang tidak bisa sekolah. Nah, itu itu artinya apakah sebenarnya persoalan ada pada jenis penerapannya, jenis tindakan-tindakan kedaruratannya aturkan pasalnya begitu lho. Karena kalau pasalnya ini kan sebenarnya pasal yang bisa dielaborasi dalam pelaksanaannya yang kemudian bisa maksimal mencapai tujuan daripada norma ini, tujuannya kan supaya bisa melindungi seluruh rakyat, seluruh bangsa, bagaimana kemudian bisa terlindungi dengan adanya undang-undang ini.

216. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak, nanti disederhanakan saja Positanya. Posita itu alasan-alasan Permohonan, Pak. Kalau di Kewenangan sudah cukup, Legal Standing cukup di Posita itu alasan-alasan Permohonan.

218. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Alasan Permohonan itu (...)

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Di Permohonan yang Bapak uraikan Panjang-lebar itu sudah dilibatkannya rakyat karena ibunya yang sakit takut di-rapid. Kemudian ponakan tidak bisa sekolah, dan sebagainya itu Bapak uraikan di alasan-alasan kan itu?

220. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu nanti di bagian itu sebelum Petitum Bapak buat sederhana saja yang pokok-pokoknya mungkin (...)

222. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Itu ada di situ, Pak, alasan pokok Permohonan saya sudah yang Cuma buat (...)

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sudah tahu itu Bapak buat yang sederhana yang lebih sederhana, lebih ringkas.

224. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Boleh diringkas lagi, ya?

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

226. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup 3 atau 4 halaman kalau Bapak tetap inginnya adalah persoalannya adalah ada di Pasal 10 ayat (1) ini, bukan di soal yang saya jelaskan tadi. Paham, ya Pak ya?

228. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Paham, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, terima kasih, Pak.

230. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Terima kasih.

231. KETUA: SALDI ISRA

Pak Rowindo itu, ya?

232. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

233. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, itu nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Majelis Panel. Nah, saya sedikit saja, Pak.

234. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

235. KETUA: SALDI ISRA

Saya tadi berpikir Bapak ini dosen tadi ini. Karena bikin apa itu ... bikin latar belakang alasan Permohonan itu Bapak kayak tahu betul ini semuanya, psikologi sosial kemudian ada ... apa namanya ... behaviour kemudian itu. Jadi, saya cari-cari ini di mana Bapak sembari ini Bapak tulis sendiri ya, Pak?

236. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Ya, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA

Nah, nanti ini latar belakang yang begitu panjang ini Bapak konstruksikan menjadi seperti Permohonan, Pak. Jadi, ini kayak makalah ini sekarang ini, Pak, betul-betul kayak makalah kalau dosen atau mahasiswa bikin makalah ini kayak begini sudah ini karena ... sayang tidak ada catatan kakinya saja.

Nah, jadi yang mulai dari halaman 7 sampai halaman 18 itu Pak. Nah, itu terlalu 11, 12 halaman, Pak, Bapak bikin alasan ... latar belakang masalah itu. Nah, nanti Bapak susun. Yang paling penting, Pak, Bapak catat, ya, Pak Rowindo.

238. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

239. KETUA: SALDI ISRA

Kenapa Pasal 10 itu, Pasal 10 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal mana dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang bertentangan itu? Tadi Bapak sebutkan Pasal 1 ayat (2).

240. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

241. KETUA: SALDI ISRA

Soal kedaulatan rakyat.

242. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

243. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu nanti kalau dipindahkan kepada rakyat, rakyat yang mengumumkan itu siapa, Pak? Nah, itu harus Bapak jelaskan sehingga kita tahu.

244. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, baik.

245. KETUA: SALDI ISRA

Ini dari presiden buang, dari pemerintah bisa dibuang lalu rakyatnya siapa, apakah kemudian kita baris sama-sama kita umumkan ini lock down begitu sekarang, Pak. Atau lock down-nya dicabut.

246. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

247. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Pak Rowindo, ya? Jadi, ini harus jelas.

248. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya.

249. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu yang akan dinilai oleh Mahkamah nanti apakah alasan-alasan Bapak itu, itu bisa diterima oleh Mahkamah atau tidak. Nah, itu yang akan kami nilai.

250. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Yang Mulia. Ya.

251. KETUA: SALDI ISRA

Nah, oke. Itu Pak Rowindo, jadi ... apa namanya ... ada yang mau Bapak tambahkan?

252. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Mungkin sedikit saja Pak. Kalau mengandalkan diri saya sendiri mungkin saya tidak akan berani melakukan ini Majelis Hakim Yang Terhormat, justru karena saya yakin kepada kemampuan Majelis Hakimlah, saya ... saya sadar akan kegaguan saya dan ketidakmampuan saya dalam menyusun argumentasi hukum pada hakekatnya karena saya tidak ... kurang ... kurang ... kurang berilmu dalam menyusunnya. Saya berharap, saya hanya bisa menunjuk, membantu menunjuk kepada Majelis Hakim untuk dapat melihat, apakah benar ini telah terjadi sesuatu yang dapat merugikan republik yang kita cintai ini bersama.

Mungkin itu, jadi saya mohon maaf kalau ... kalau saya kurang mampu menjelaskan dengan baik argumentasi saya. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim telah memberikan ruang dan waktu untuk saya menyampaikan permohonan ini. Itu saja, Majelis Hakim. Terima kasih.

253. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Nanti pak, kalau bapak misalnya tidak bisa memperbaiki atau perlu pendamping, mungkin Bapak tanya-tanyalah ... apa namanya ... kepada ada LBH segala macam yang bisa membantu untuk kerja-kerja seperti ini. Tapi kalau Hakim tidak bisa bantu, Pak, kami hanya menasihatkan seperti itu. Nanti kalau kami bantu, berarti permohonan kami nanti jadinya.

254. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, betul, Majelis Hakim Yang Mulia. Betul, betul.

255. KETUA: SALDI ISRA

Nah, Pak Rowindo. Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu untuk melakukan perbaikan itu selama 14 hari sejak hari sidang ini, ya. Jadi, kalau Bapak merasa dari nasihat tadi ada yang perlu diperbaiki, Bapak kemudian perbaikilah. Nanti perbaikannya itu disampaikan dalam sidang berikutnya, nanti akan ada sidang lagi nih, Pak Rowindo, sidang Perbaikan Permohonan.

256. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Ya, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA

Nah oleh karena itu, sebetulnya kalau berdasarkan jadwal 14 hari berikutnya itu nanti akan ketemu dengan ... apa namanya ... jadwal hari raya ya, Hari Raya Idul Fitri. Nah oleh karena itu, Bapak tetap ... apa namanya ... Perbaikan Permohonan itu diserahkan 14 hari, dikirim ... Bapak kirim ke Kepaniteraan, nanti paling lama 14 hari, nanti sidang Perbaikan Permohonannya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah, ya, setelah selesai lebaran.

258. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Baik, Yang Mulia. Ya.

259. KETUA: SALDI ISRA

Bapak paham, ya?

260. PEMOHON: ROWINDO HATORANGAN TAMBUNAN

Paham, Yang Mulia, paham.

261. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih kalau sudah paham. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 28 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.